BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Kiai Langgar

a. Kiai langgar: Sebuah Definisi

Gambaran tentang sosok 'kiai', kerap kali diasosiasikan sebagai figur seseorang yang secara fisik selalu mengenakan 'kain sarung', 'bersorban', memakai 'sandal slop' atau 'bakiak', kepalanya tertutup peci hitam atau putih (bagi yang telah menunaikan ibadah haji) dan ditangannya selalu tidak lepas dari santai 'tasbih'. Sikapnya kadang dipandang kolot, fanatik, sulit diajak dialog dan mungkin sebagian orang menganggapnya 'puritan'. Penilaian seperti ini, sebenarnya cenderung bersifat subjektif berkaitan dengan pengertian 'kiai' sebagai pribadi, dan tidak melihat kedudukan seorang 'kiai' sebagai anggota atau tokoh masyarakat (kelompok sosial). Kiai sebagai anggota atau tokoh masyarakat tidak jauh berbeda dengan anggota masyarakat lainnya, yakni memiliki sikap dan sifat kepribadian yang berbeda-beda.[14]

Kata 'kiai' merupakan kata yang sudah cukup akrab dan populer di tengah masyarakat Indonesia apalagi bagi masyarakat Jawa Timur. 'Kiai' seringkali dipahami sebagai sebutan bagi alim ulama Islam.[15] Ia juga merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli

---

[14]Suhermanto Ja'far, *Relasi Kuasa Antara Kiai Khos Dengan Kiai Kampung (Studi tentang Efektivitas Komunikasinya dalam Masyarakat Politik)*

[15] WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan sebuah pondok pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya.

Dalam konteks masyarakat kita istilah ulama telah terintegrasi dengan istilah kiai. Bahkan telah di anggap memiliki kesamaan arti dan makna. Kiai atau ulama dalam kehidupan masyarakat dan bangsa ini telah menempati posisi sosial yang tidak dapat dipisahkan. Kiai bahkan telah menjadi sentral dari semua aktivitas yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dilakukan masyarakat.[16]

Quraish Shihab, seperti di kutip Abd. A'la. Menyebutkan peran ulama di Indonesia khususnya di Jawa Timur bisa disebut atau identik dengan kiai yang memberikan petunjuk dan bimbingan keagamaan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang berkembang, seperti perselisihan pendapat dan problem sosial yang lain.

Dengan kata lain, kiai adalah segala-galanya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di pedesaan. Karena itulah komitmen terhadap posisi kiai bagaikan setali tiga uang. Kiai adalah pemimpin sejati yang dihormati dan dibela. Bahkan dalam perkembangannya, kiai bukan hanya dijadikan perantara yang mampu memberikan berkah keilahiaan, tetapi melebihi batas itu. Kiai tidak hanya memiliki pengaruh dalam wacana praktek ritual keagamaan saja, yakni menyangkut kepemimpinan sosial secara umum. Penghormatan

[16] Darwis Maszar, *Perilaku Politik Ulama & Kiai Dalam Sorotan,*(Surabaya , elKAF 2008),hal. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepatuhan masyarakat Madura, misalnya terhadap kiai jauh melebihi kepatuhan kepada pejabat, birokrasi, atau institusi Negara.[17]

Zainal Fatah (1951) menerangkan gerakan kiai berasal dari keluarga bangsawan yang tidak mau mempergunakan gelar kebangsawanan. Mereka lalu menggantikannya dengan kiai. Namun dalam perkembangannya gelar kiai diberikan kepada seseorang yang memiliki cakrawala pengetahuan agama yang luas, serta intelektual yang memberikan pelayanan dalam membina kehidupan masyarakat.[18]

Karena itu, istilah kiai yang digunakan untuk menyebut figure keagamaan, sebenarnya berasal dari istilah dimana agama Islam muncul, yang merupakan produk lokal jawa yang kemudian dipakai untuk menyebut nama seorang kiai.

Jadi pada terminologi ini dalam peristilahan kiai Pada masa kolonial, kiai-kiai kampung mampu tampil sebagai utama gerakan-gerakan rakyat menentang kolonial. Posisi kiai kampung semakin berpengaruh dan disegani. Seperti dikatakan Donal K Emmerson (1976). Peristilahan kiai muncul pertama kali dari bahasa jawa. Kata-kata kiai dalam pemahaman masyarakat jawa mempunyai makna yang agung, keramat dan dituakan. Selain untuk benda, seperti keris dan gamelan, gelar kiai juga diberikan kepada laki-laki yang lanjut usia, arif dan dihormati.

Penyebutan kiai biasanya juga digunakan untuk menyebut ulama (orang yang mendalam pengetahuan ke-Islamannya). Di Jawa barat

---

[17] Ibid. hal. 31

[18] Tim Penyusun Sejarah Sumenep, *Sejarah Sumenep,* (Sumenep: Dinas Periwisata Dan Kebudayaan Sumenep 2003). Hal. 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka disebut Ajengan, di Jawa tengah dan Jawa timur disebut Kiai dan di Madura disebut Mak kyae, Bindara atau Nun. Jadi predikat kiai adalah sebutan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada elit agama yang telah diketahui kealimannya, memiliki peranan dalam kehidupan sosial-keagamaan dan masyarakat dapat merasakan jasanya serta menerima tuntunan serta kepemimpinannya.

Istilah kiai kampung merujuk pada sosok kiai yang hidup di kampung atau pedesaan yang menjadi pengasuh sebuah Musolla (di jawa sebenarnya lebih dikenal dengan istilah langgar atau surau), atau masjid.[19] Mosollah atau masjid biasanya di kelola dalam semangat kebersamaan dan kegotong royongan tidak ada yayasan, juga tidak ada pemilik tunggal karena itu, sosok kiai kampung secara sosio-kultural dituntut untuk lebih egaliter dan tidak menonjolkan diri.

Gaya kepemimpinannya bisa dikatakan bersifat interaktif, dialogis dan partisipatoris. Keberadaannya adalah merawat semangat kebersamaan agar kohesi dan dinamika masyarakat pedesaan tetap berada dalam bingkai nilai-nilai agama dan moral masyarakat.

Di tengah fungsinya sebagai pendidik agama dan sekaligus warga masyarakat biasa, kiai kampung juga berfungsi sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Ia menempati fungsi sebagai pemersatu masyarakat dengan meninggalkan kecendrungan yang bersifat nominative

---

M.Hanif Dhakiri, *Kiai Kampung & Demokrasi likal,* (yogyakarta:KLIK, 2007),hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hegemonik.[20] Dengan demikian sosok kiai langgar mengajar di Mosollah atau masjid sebagai pemersatu masyarakat di pedesaan.

Di Indonesia dikenal berbagai nama untuk menyebut entitas bernama desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan kebudayaan.[21] Desa atau kampung menurut Paul H Landis seperti dikutip Raharjo (2004) - secara sosio psikologis di artikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya.sedangkan dari sudut pandang ekonomi, desa difinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Sebuah langgar sama saja dengan masjid, hanya ia lebih kecil, sering kali merupakan milik pribadi (walaupun beberapa langgar merupakan yayasan umum sebagaimana halnya dengan hamper semua masjid), dan sembahyang jum'at tidak dilakukan di dalamnya.[22]

Di lingkungan seperti itulah kiai-kiai kampung hidup dan berkembang bersama masyarakat. Karena itu, bisa jadi istilah dan pengertian kiai kampung sama dengan istilah kiai mukim atau kiai langgar. Krakteristik utamanya terletak pada posisinya sebagai kiai di level masyarakat yang paling kecil, yaitu pedesaan mengasuh sebuah Mosollah atau langgar dan mata pencaharian sebagaimana masyarakat desa pada umumnya. Kiai kampung atau pengasuh langgar biasanya tidak

---

[20] Ibid. hal.14
[21] Ibid , Hanif Dhakiri.hal 14
[22] Clifford Geertz, *ABANGAN, SANTRI PRIYAYI, Dalam Masyarakat Jawa.* Terjemahan oleh Aswab Mahasin (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya 1981), hal. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengaruh terlalu luas. Karena dalam suatu desa terdapat beberapa kiai di langgar.

Dalam terminologi kiai langgar adalah nama tempat.[23] Langgar yang digunakan sebagai tempat peribadatan umat Islam di Jawa. Fungsinya hampir sama dengan masjid hanya saja tidak digunakan untuk ibadah sholat Jum'at. Jadi dapat juga di katakan sebagai kiai yang mengasuh si musholla, maka dapat di katagorikan dalam istilah bahasa Madura (*langghar*) di mana kiai seperti ini hanya memelihara dan mengasuh sebuah langgar atau Moshollah dengan mendidik anak-anak untuk belajar ngaji.

b. Peran Kiai Langgar Dalam Masyarakat Desa

Secara umum peran kiai langgar dalam kehidupan masyarakat desa di diskripsikan sebagai berikut.[24]

1. Pendidik Agama.

Kiai merupakan padanan dari kata ulama. Karena itu, tugas dasar kiai adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat namun dalam konteks sejarah sosial Indonesia, selain berperan sebagai pendidik agama, kiai juga mengandung arti sebagai orang yang di hormati pendidikan agama dengan demikian juga tidak semata-mata mengajarkan agama kepada umat, tetapi menginternalisasikan ke dalam kehidupan kiai

[23] Pengertian langgar adalah nama sebuah tempat peribadatan ummat islam akan tetapi tidak di pakai dalam sholat jum'at, jadi istilah ini upaya menjadi pemahaman sebagaimana, di desa-langgar di jadikan tempat aktifitas sholat.
[24] Ibid . Hanif Dhakiri hal. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri sehingga apa yang di ajarkan atau diucapkan untuk orang lain juga dilakukan untuk dirinya sendiri.

Kiai kampung bukanlah pengamat, tetapi pendidik sekaligus pelaku sosial sehingga pemahamannya atas persoalan masyarakat tidak semata-mata teoritis, tetapi sangat mempertimbangkan kemungkinan dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan menjalankannya kiai kampung tidak mengenal wacana keagamaan yang rumit dan bertakik-takik, tetapi lebih banyak berbicara ajaran agama dan memberikan contoh.

2 Penjaga Moral

Sebagai pendidik agama, kiai-kiai kampung otomatis menjadi penjaga moral masyarakat pedesaan. Keberadaannya yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan mengharuskannya berperilaku sebagai penjaga moral dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.

Keterlibatan kiai kampung dalam penegakan moral masyarakat bisa di katakan menjadi bagian paling kritis dalam kehidupannya karena fungsi ini sering kali menyebabkan bersinggungan dengan orang atau kelompok lain. Karena kebijaksanaan dan kearifan nya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan hati, seorang kiai kampung bisa lebih diterima dan tetap disegani oleh masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ahli Hikmah

Beberapa kiai kampung juga menjadi tokoh lokal yang menonjol karena dianggap karena mempunyai kelebihan dalam hal *ilmu hikmah* yang berfungsi membantu masyarakat dalam menghadapi atau untuk menyelesaikan sebagai persoalan yang di hadapi.

4. Pemimpin Komunitas

Sebagai pendidik agama Islam, penjaga moral masyarakat dan tempat masyarakat meminta bantuan tentang berbagai persoalan kehidupannya, kiai kampung menjadi semacam rujukan bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Disadari atau tidak dengan fungsi seperti itu, kiai kampung bisa di katakana sebagai pemimpin komunitas yang terpilih secara alamiah. Seorang kiai kampung menjadi pemimpin tanpa rekayasa politik dan masyarakat menerima kepemimpinannya dengan sukarela.

5. Pembimbing Untuk Perubahan

Kiai kampung juga berperan sebagai pemandu utama masyarakat menghadapi dan melaksanakan perubahan. Salah satu kelebihan kiai kampung adalah sifat pengajarannya yang menyeluruh meliputi semua aspek kehidupan praktis masyarakat dan pengayaan ruang batinnya dengan nilai-nilai dan karakter yang di anjurannya. Kecenderungan demikian menjadikan kiai kampung memiliki peran penting dalam setiap perubahan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Independensi Politik

a. Mendefinisikan Politik

Menjelang pemilihan umum digelar, banyak sekali tulisan yang bernada gugatan terhadap keabsahan para ulama atau kiai yang terjun di dunia politik praktis dengan aktif di salah satu partai politik (parpol).[25]

Didefinisikan Sosiologi politik sebagai penyelidikan mengenai kaitan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah politik.[26]

Oleh sebab itulah para sosiolog politik berkepentingan dengan relasi antara lembaga-lembaga politik dan nilai-nilai, dengan cara bagaimana lembaga tersebut dibentuk oleh nilai-nilai itu terbentuk oleh lembaga-lembaga dalam suatu proses perubahan yang timbal balik.[27]

Karena itulah, istilah politik sesungguhnya merangkum pengertian yang cukup luas. Surbakti (1992:18) mengenven-tarisasi bahwa hingga perkembangan yang terakhir ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik . *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang di tempuh

---

[25] Pengertian politik telah menjadi salah satu bahan perbincangan dan sekaligus perdebatan yang berkepanjangan. Hingga saat ini, tidak ada satu kata sepakat terkait dengan pemahaman dan pemaknaan politik. F. Isjwara menyatakan bahwa ada perbedaan antara politik dan ilmu politik. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *polis* yang berarti 'kota' atau 'negara kota'. Dari kata *polis* ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti 'polites' (warga negara), 'politikos' (kewarganegaraan/civic), 'politeke techne' (kemahiran dalam bidang kenegaraan), dan 'politike episteme' (ilmu politik). Orang Romawi mengambil perkataan Yunani tersebut dan menamakannya "pengetahuan tentang Negara (Pemerintahan)" atau 'ars politca' yang berarti kemahiran (*kunst*) tentang masalah-masalah kenegaraan. Lihat, F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Binacipta, 1982), Cet. VIII, hlm. 21; Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 20.

[26] Michael Rush , Phililp Althoff , *Pengantar Sosiologi Politik*, di terjemahkan oleh Kartini Kartono (Jakarta: PT Raja Grafindo persada , 2007), hal. 289

[27] Ibid, hal. 293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua,* politik sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintah. *Ketiga,* politik sebagai segala kegiatan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat,* politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima,* politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang di anggap penting.[28]

Maka dari itu, politik berkaitan pelaksanaan kegiatan dan sistem politik untuk tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan, dalam hal ini adanya penggunaan kekuasaan agar tujuan tersebut dapat terlaksana. Perlu untuk dipahami bahwa tujuan yang telah ditentukan tersebut merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu.

Jadi definisi politik menurut *Deurtsch* (1990:20) adalah koordinasi usaha-usaha serta pengharapan manusia yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan masyarakat. Politik dapat diartikan sebagai segala urusan, kebijaksanaan dan siasat serta cara bertindak dalam menghadapi dan menangani masalah serta daya upaya untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan sosiologi politik dasarnya berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik, yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya.

---

[28] Imam Suprayogo, *Kyai Dan Politik Membaca Citra Poltik Kyai,* (Malang: UIN Malang Press. 2007), hal. 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada perkembangannya, peran kiai tidak lepas dari peran serta dalam percaturan perpolitikan di bangsa ini, dengan peran serta kiai pada panggung politik merupakan suatu keniscayaan untuk itu citra kiai dalam masyarakat mengalami pergeseran.

Aspek politik kepemimpinan kiai perlu diperhatikan karena ia mengungkapkan pola patronase dalam hubungannya dengan masyarakat, dan bagaimana kekuasaannya secara jelas terlihat sentralitas. Otoritas dan kekuasaan kiai dalam masyarakat menimbulkan asumsi bahwa pengaruh kiai tidak terbatas hanya pada hubungan sosial saja, tetapi juga diterapkan dalam bidang politik.[29] Asumsi ini dibuktikan dengan fakta bahwa selama pemilu, misalnya, partai peserta pemilu coba memanfaatkan kiai untuk meningkatkan perolehan suara mereka. Pengaruh kiai ini tentu saja begitu jelas di kalangan umat Islam saleh yang sering mengikuti langka politik kiai.

Di Indonesia, peran kiai dan ulama dalam politik juga cukup signifikan. Geertz mencatat bahwa para kiai tidak saja berperan sebagai agen kebudayaan, akan tetapi dalam perkembangannya mereka memainkan peran yang signifikan sebagai pemimpin-pemimpin politik. Dalam kehidupan politik praksis misalnya, akan mudah kita temukan kiai-kiai yang berperan menjadi Juru kampanye untuk sebuah partai politik. Dengan ajakan dan fatwa politik yang mereka sampaikan, para kiai berhasil para jamaah di pesantren-pesantren mereka dan lapisan komunitas

[29] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai Dan Kekuasaan.*(Yogyakarta.LKiS.2003)hal. 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sekitar pesantren-pesantren untuk memberikan suara mereka pada partai tersebut. Ajakan dan fatwa politik yang di serukan oleh para kiai dan ulama pesantren itu menjadi faktor penentu bagi peningkatan perolehan suara partai politik dalam pemilu. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa peranan para kiai dan ulama dalam kampanye politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam konteks pemilu di Indonesia adalah sangat penting dan strategis.[30]

Para kiai dan ulama adalah pemimpin nonformal sekaligus berperan sebagai sosok pemimpin spiritual, dan posisi mereka sangat dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat lapisan bawah di desa-desa. Sebagai pemimpin masyarakat, para kiai dan ulama mempunyai jamaah, komunitas dan massa yang diikat oleh hubungan keguyuban yang erat. Petuah-petuah mereka akan selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh para jamaah, komunitas dan massa yang dipimpinnya.[31] Peningkatan kesadaran politik masyarakat diikuti lahirnya embrio masyarakat bebas struktur telah mendorong terjadinya demassifikasi sosial.[32]

Keruntuhan dominasi rezim orde baru pada tahun 1998 telah menjadikan kondisi panggung perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan secara dramatis.[33] Kenyatan ini, lantas membangkitkan euforia baru di kalangan masyarakat negeri ini, yakni hinggar bingarnya

---

[30] ://ghufroniberbagi.blogspot.com/2010/04/antropologi-kiai-kiai-sebagai-jembatan.html, Kamis 13, 2010, (10:13:34)

[31] ://ghufroniberbagi.blogspot.com/2010/04/antropologi-kiai-kiai-sebagai-jembatan.html, Kamis 13, 2010, (10:13:34)

[32] Soegeng Sarjani,. *Politik Yang Santun* (Jakarta . Syndicated) hal.6

[33] Darwies Maszar,. *Perilaku Politik Ulama & Kiai Dalam Sorotan,* (Surabaya, eLKAF 2008), hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai elemen untuk terlibat aktif dalam proses demokratisasi dan pemerintahan, tak terkecuali kalangan ulama atau kiai, yang pada masa-masa sebelumya eksistensinya nyaris terpingkirkan pada proses pengambilan keputusan politik maupun dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam perkembangannya, keterlibatan sosok kiai dalam kancah politik praksis tidak seindah seperti yang dibayangkan. Sebab, keberadaan kiai pada jalur politik baik langsung ataupun tidak langsung ternyata malah menimbulkan persoalan dan perdebatan, yang lantas melahirkan fenomena tersendiri atas pilihan politik kiai dalam kacamata masyarakat, sehingga peran dan posisi sosok kiai berubah orientasi dari nilai-nilai pengajar pendidikan agama beralih ke panggung politik. Betapa dapat dilihat jika kiai terlibat dengan organisasi sosial politik tertentu, maka warga masyarakat juga akan mengikutinya.[34] Bahkan, campur tangan ulama-kiai dalam kalangan yang menolak terkadang telah dianggap sebagai satu perselingkuhan fungsi kiai.

b. Independensi Politik kiai

Bagi sebagian kalangan masyarakat , kiai pesantren seharusnya tidak masuk ke kancah politik praktis, dan tetap berkonsentrasi di bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Alasannya, wilayah kiai adalah sakral, berdimensi gerakan moral yang penuh dengan nilai-nilai keikhlasan, tanpa tendensi dan ambisi, menjadi milik semua golongan. Sedang dunia politik adalah profan yang

[34] Nur Syam,. *Bukan Dunia Berbeda Sosiologi Komunitas Islam.*(Surabaya Eureka 2005),. Hal. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meniscayakan adanya kepamrihan, penuh muatan politis, tendensius, dan akibatnya para kiai hanya menjadi alat politik kelompok tertentu.

Pada persoalan ini, tentang independensi politik adalah bagaimana dengan independensi politik kiai oleh karena itu lebih baik jika dia menghindarkan diri dari kegiatan politik dengan tetap kiai tidak terkontaminasi terhadap hiruk pikuk politik praktis, dalam pada itu, sosok kiai tetap independensi terhadap politik. Sebenarnya ada sebagian masyarakat mengharapkan posisi dan peran kiai berdiri independen tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, tidak terkontaminasi oleh hingar-bingar panasnya perpolitikan dewasa ini.

Dalam pada itu, terminologi independensi adalah kemandirian dan berdiri sendiri, maka dengan istilah ini independensi politik merupakan suatu peristilahan dimana dalam katagori ini, berdiri sendiri dan tidak terikat dengan hingar bingar dunia politik praksis. Dengan dasar ini sosok kiai tetap pada jalur dan koridor sebagai pendidik agama dan tidak ikut dalam percaturan politik praksis dengan cara independensi terhadap perpolitikan di tengah masyarakat.

Jadi pendekatan independensi politik merupakan salah satu cara untuk tidak ikut dalam percaturan perpolitikan, dan sehingga bebas dari perselingkuhan politik praksis dan tidak terikat dengan politik apapun. Dimana afiliasi politik pada muktahir ini, sangat rentan dengan kepentingan kelompok dan golongannya. Maka dari itu sosok seorang kiai tetap pada jalur dan koridor penjaga nilai-nilai keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Selalu muncul gugatan senada dan saran agar kiai mempertimbangkan kembali peran sertanya di bidang politik apalagi politik praktis. Sebagaimana dikemukakan banyak pihak, terlalu banyak minus atau dampak negatif yang harus ditanggung, baik bagi diri kiai yang bersangkutan maupun umat di bawah naungannya. Jeratan, jebakan, rayuan dan racun politik dalam berbagai bentuk, seperti materi, kekuasaan, permainan kotor atau fitnah terlalu mudah dideteksi oleh publik, sementara kiai tidak seluruhnya cerdas dan lihai berpolitik

Sepintas, argumen yang diajukan beberapa kalangan agar kiai tidak berpolitik sangat luhur dan mulia. Sebagian kalangan itu sepertinya menghendaki agar kesucian, keluhuran moral, dan tugas mulia para kiai yang ada di dunia 'lain' harus tetap terjaga dari 'comberan' politik yang penuh dengan kenistaan. Bahkan, boleh dibilang mereka berusaha menyelamatkan para kiai dari godaan politik yang kotor.

Begitu juga yang terjadi di Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura, dengan banyaknya kiai pesantren terjun di ranah politik kepercayaan masyarakat semakin hilang, kajian ini dalam pembahasannya meneliti sosok kiai dalam independensi politik praksis pada kancah perpolitikan dewasa ini khususnya sosok kiai langgar.

Seiring dengan potret dan dari realitas ini, ketika sosok seorang kiai berubah orientasi pilihan dan terkontaminasi dan terjun terhadap politik praksis, maka kesakralan kiai pupus dan hilang di mata masyarakat. Jadi pada dewasa ini pandangan masyarakat terhadap sosok kiai, ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilihan-pilihan rasional terhadap sosok kiai untuk di jadikan panutan di tengah masyarakat.

B. Kajian Teoritik

1. Teori Tindakan Max Weber

Pada kajian penelitian ini, studi tentang. Kajian Sosiologis Tentang Independensi Politik Kiai langgar dalam kajian teoritisnya termasuk pada paradigma definisi sosial adalah penjelasan paradigma ini bersumber dari karya Weber yang konsepsinya tentang fakta sosial sangat berbeda dengan konsep Durkheim.[35] Secara definitif Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami *(interpretative understanding)* tindakan sosial serta antara hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Dalam definisi ini, terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan sosial. Kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman.[36]

Pada penelitian ini, kajiannya menggunakan teori tindakan sosial (Max Weber). Bagi Weber ciri yang mencolok dari hubungan-hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Dia percaya bahwa kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan-kegiatan antar pribadi dari anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, melalui analisis atas berbagai macam

[35] Zamroni,. *Pengantar Pengembagan teori Sosial,* .(Yogyakarta. Tirai Wacana1992),. Hal 53
[36] George ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda,*.(Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2009), hal 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan manusialah kita memperoleh pengetahuan mengenai ciri dan keanekaragaman masyarakat-masyarakat manusia.[37]

Weber mendefinisikan sosiologi sebagai sebuah ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial agar dengan cara itu dapat menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai pelaksanaan dan akibat-akibatnya. Definisi ini sebuah kompromi antara pemusatan perhatian positivis ketat terhadap generalisasi-generalisasi kausal dan penolakan total sejarawan humanistik atas relevansi analisis kausal terhadap tingkah laku manusia.

Menurut Weber, menjelaskan tingkah laku adalah memahaminya, dan memahami menuntut kita masuk ke dalam pikiran dan perasaan-perasaan para pelaku sosial. Teori Weber tentang manusia didekati melalui penciriannya atas empat jenis tindakan manusia. Yang pertama, Dengan memakai pandangannya tentang tipe ideal, Weber memulai analisisnya dengan mengambil dari serangkaian tingkah laku manusia cita-cita tingkah laku rasional yang ia sebut *Zweckrational* atau rasional.

Yang kedua dari empat jenis tindakan sosial Weber adalah tingkah laku *Wert rational* atau rasional nilai. Menurut model ini seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Yang *ketiga:* Weber memiliki sebuah tipe ideal untuk tindakan efektif atau emosional, yaitu tingkah laku yang berada di bawah dominasi langsung perasaan-perasaan. Di sini tak ada rumusan sadar atas

---

[37] Tom Compbell ,. *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandinagan,*.(Yogyakarta.Kanisius , 1994), hal. 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai atau kalkulasi rasional sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali emosional dan karenanya tidak rasional.

Weber mempunyai sebuah katagori yang keempat untuk tindakan manusia ia beri nama tradisional untuk mencakup tingkah laku berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktik-praktik yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. Jenis tingkah laku ini tak bisa dianggap cukup sebagai tingkah laku yang dimaksudkan dan karenanya sebagai tindakan sejati, tetapi Weber memperhitungkan intensionalitas sebagai suatu yang implisit dan relative berada di bawa sadar, dan dalam segi ini tindakan tradisional bukannya tidak sama dengan tindakan efektif.

Dengan mempergunakan tipe-tipe ideal tindakannya, Weber bisa menyusun sebuah gambaran terpadu mengenai manusia individual menurut kombinasi jenis-jenis tindakan yang menciptakan tingkah laku mereka dan kepercayaan-kepercayaan dan nilai-nilai khusus yang mereka miliki.

Dengan demikian analisa teori Weber pada tindakan masyarakat yang selalu mereka menafsirkan, dan memahami, memaknai kehidupan sosial, sebagaimana dalam tindakan Weber adalah konsep tentang antara hubungan sosial. Maka dalam pemaknaannya dalam tindakan manusia mempunyai kausal dan makna.

Dari kajian ini tidak lepas dari kajian Weber teori tindakan sebagaimana di jelaskan bahwa masyarakat mempunyai tipe-tipe tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan sebuah pilihan dan bersikap untuk peneliti menggunakan tipe tindakan rasional instrumental.

Bentuk yang paling tinggi dengan unsur pertimbangan pilihan yang rasional sehubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipilihnya.[38] Maka dari ini, dalam pandangan masyarakat pada pilihan tindakan lebih mengarah pada tindakan rasional, dengan pandangan ini oleh Max Weber, yang terkenal dengan teori sosiologinya, *'teori tindakan'*. Dalam teorinya tersebut, dengan tanpa melepaskan pencarian positivistis untuk penjelasan-penjelasan kausal, Weber berupaya menempatkan konsep tindakan individual yang bermakna pada pusat teorinya tentang masyarakat. Bagi Weber, ciri yang mencolok dari sebuah relasi sosial adalah kenyataan bahwa relasi-relasi tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya.

Pada titik ini, Weber percaya bahwa kompleks hubungan-hubungan sosial yang membentuk suatu komunitas masyarakat tertentu dapat dimengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subjektif dari kegiatan-kegiatan antar pribadi dari masing-masing anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perspektif Weber, melalui analisis atas berbagai macam tindakan manusialah seseorang akan mendapatkan pengetahuan tentang ciri dan keanekaragaman masyarakat-masyarakat manusia.

---

[38] Agus Salim, *Perubahan Sosial Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Jogjakarta: PT Tiara Wacana. 2002), hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pendekatan kajian ini, masyarakat desa gapura barat kecamatan gapura ketika melihat sosok kiai khususnya kiai langgar yang masih kokoh tetap dalam jalur yang independen terhadap politik praksis, maka masyarakat tetap dengan pola tindakan yang rasional dalam bersikap.

Maka dari itu, dari analisa Weber pada tindakan masyarakat secara rasional dengan pilihan-pilihan atas tujuan yang lebih bersifat kausal, sehingga masyarakat dengan pilihannya bertujuan dan ingin berubah lebih baik. Dengan pola ini melihat peranan kiai langgar yang sampai hari ini masih dalam konteks kiai yang belum terkontaminasi terhadap politik maka dari pada itu masyarakat gapura barat dalam pandangannya kiai langgar sebagai satu pilihan.

Dengan teori Weber itu, relasi masyarakat politik {Konstituen} dan Kiai dapat dijelaskan dengan argumentasi, bahwa pemaknaan individu-individulah yang melahirkan sebuah konsensus, dan konsensus itulah yang pada akhirnya menciptakan relasi-relasi di antara mereka di tenggah masyarakat dan kiai langgar terjaga utuh ketika kiai tidak terjun dalam politik dewasa ini.

Dengan demikian, masyarakat punya pilihan tersendiri terhadap perilaku pilihan politik dewasa ini dengan pilihan-pilihan rasional dan semacam ini, terjadi dengan masyarakat gapura barat dimana ketika sosok kiai pesantren-pesantren terjun pada politik praksis, masyarakat lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung memilih kiai langgar sebagai panutan dengan alasan kiai langgar tidak ikut politik sehingga lebih menjaga nilai-nilai agama.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menganggap penting terhadap penelitian yang terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap pelembagaan dan analisa terhadap tema penelitian ini, karena dengan adanya hasil penelitian dahulu sehingga dapat juga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penilaian, minimal menjadi acuan dan sebagai pedoman penelitian tentang studi-studi kiai dalam perkembangannya.

Dengan beberapa taraf penelitian yang terdahulu, maka hal ini, penulis mampu menemukan acuan-acuan sebagai referensi terhadap dinamika perkembangan kajian sosiologis tentang studi-studi kiai pada mutakhir ini, jadi dalam taraf ini peneliti menganggap penting dengan adanya sebuah penelitian yang terdahulu dan relevan pada konteks hari ini.

Maka maksud dan tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui alur kajian nya, akan tetapi dari kajian penulis mencoba mencari temuan-temuan baru dengan tema "Kiai Langgar Dan Independensi Politik" maka dari ini penulis mencoba mencari tentang penelitian terdahulu yang relevan, akan tetapi peneliti mencari karakter dan sisi lain, terkait dengan studi kiai.

Jadi dari penelitian yang terdahulu yang relevan di antaranya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suhermanto Ja'far tidak diterbitkan. Relasi Kuasa Antara Kiai Khos Dan Kiai Kampung [*Studi tentang Efektivitas Komunikasinya dalam Masyarakat Politik*] penelitian ini membahas tentang pengaruh kiai khos terhadap politik dengan kiai kampung bagaimana peran kedua sosok kiai dengan karakternya masing-masing. Istilah *kiai Khos* merupakan istilah yang ditujukan kepada kiai-kiai yang tingkat spiritualitasnya sangat tinggi dan tidak aktif dalam kehidupan politik praktis, tetapi mereka selalu menjadi rujukan bagi kalangan politisi NU dalam menentukan kebijakan-kebijakan partai. *Kiai khos* ini adalah para kiai yang hanya menjadi pengasuh pondok pesantren dan cenderung pada kehidupan sufi dan juga dipercayai mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi dan juga dianggap tahu sebelum terjadinya fenomena-fenomena kehidupan di tengah masyarakat yang tidak terbatas pada masalah politik semata, sehingga selalu dijadikan tempat nasehat bagi para politisi NU. Munculnya istilah *kiai kampung* dalam wacana politik di Indonesia, khususnya bagi PKB, merupakan bentuk 'tandingan' terhadap sosok *kiai khos* yang banyak tidak mendukung duet Semarang nya. Para *kiai khos* cenderung mendukung muktamar Surabaya yang dipelopori oleh H. Choirul Anam.
2. M.Hanif Dhakiri. 2007, (*Kiai Kampung & Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: KLIK) buku ini dalam penjelasannya mengangkat tentang peranan kiai kampung pada demokrasi lokal khususnya pedesaan sehingga dapat di kategorikan peranan kiai kampung sangat penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara khusus buku ini mengkaji posisi dan peran kiai kampung dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan. Penekanan pada kiai kampung di sini bukan dimaksudkan untuk lebih menonjolkan peranannya dibandingkan dengan kiai pesantren, tetapi sekedar mengisi ruang kosong dalam berbagai studi tentang kiai di mana peran kiai kampung cenderung diabaikan selama ini. Tidak ada prestasi untuk mengidealisasi kiai kampung selain hanya upaya mengembangkan kajian yang lebih seimbang, agar minat pada suatu bidang tidak menjadikan kita lupa pada bidang yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id